



**LAPORAN HASIL
KUNJUNGAN KERJA KOMISI VII DPR RI
KE PROVINSI JAWA BARAT**

**RESES MASA PERSIDANGAN I
TAHUN SIDANG 2020 - 2021**

**SEKRETARIAT KOMISI VII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
OKTOBER 2020**

BAGIAN I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Jawa Barat secara geografis terletak di antara 5° 50' - 7° 50' Lintang Selatan dan 104° 48' - 108° 48' Bujur Timur. Dengan luas wilayah 37.851.11 km², wilayah Jabar berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan DKI Jakarta di sebelah utara, di timur berbatasan dengan Jawa Tengah, di selatan dengan Samudera Hindia dan di barat berbatasan dengan Provinsi Banten. Provinsi Jawa Barat memiliki kondisi alam dengan struktur geologi yang kompleks. Kawasan utaranya merupakan dataran rendah sedang bagian tengahnya merupakan daerah pegunungan, atau rangkaian dari pegunungan yang membentang dari barat hingga timur Pulau Jawa. Adapun kawasan selatan merupakan daerah berbukit-bukit dengan sedikit pantai.

Jawa Barat memiliki lahan yang subur yang berasal dari endapan vulkanis dan dialiri oleh banyak aliran sungai yaitu sungai Cisadane, Sungai Ciliwung, Sungai Cisande, Sungai Cimandiri, Sungai Citarum, Sungai Cimanuk, dan Sungai Citanduy sehingga sebagian besar lahannya digunakan untuk pertanian. Sama seperti daerah lain di Indonesia, iklim di Jabar adalah tropis, dengan suhu 9°C di Puncak Gunung Pangrango dan 34°C di Pantai Utara. Adapun rata-rata memiliki curah hujan 2.000 mm per tahun, namun di beberapa daerah pegunungan terjadi curah hujan antara 3.000 sampai 5.000 mm per tahun.

Sumber daya alam di Provinsi Jawa Barat cukup melimpah di berbagai sektor. Kontribusi industri cukup menonjol bagi perekonomian di daerah Jawa Barat. Hampir seluruh wilayah Jawa Barat kaya akan potensi sumber daya bahan galian industri dan konstruksi seperti pasir, lempung, batu gunung, batu kali, zeolit, marmer, kalsit, dan sebagainya. Jenis bahan galian tambang yang mempunyai produksi terbesar adalah batu kapur, namun bahan galian yang paling banyak diusahakan adalah bahan galian pasir.

Daerah Provinsi Jawa Barat mempunyai berbagai potensi bahan tambang dan galian, seperti minyak dan gas bumi di daerah Cirebon dan

Indramayu, tambang emas di Gunung Pongkor, Gunung Limbung, dan Purwakarta. Selain itu, Jawa Barat juga memiliki bahan galian marmer di daerah Tasikmalaya, Bandung, dan Sukabumi. Batu kwarsa banyak terdapat di Bogor, Sukabumi, Bekasi dan Cirebon, fosfat banyak terdapat di daerah Ciamis dan Sukabumi, serta bentonit, zeloit dan gips tersebar di beberapa daerah. Potensi pertambangan batu mulia umumnya banyak terdapat di daerah Kabupaten Garut, Tasikmalaya, Kuningan, dan Sukabumi. Potensi minyak dan gas bumi yang dimiliki Provinsi Jawa Barat cukup melimpah sebagai sumber energi primer. Energi merupakan salah satu penggerak utama roda perekonomian nasional, karena konsumsi energi terus meningkat mengikuti permintaan berbagai sektor pembangunan khususnya industri dan transportasi.

Panas bumi merupakan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Kelebihan panas bumi lainnya bahwa pembangkit panas bumi dapat dioperasikan sampai 90% kapasitas dan waktu operasi yang sampai 30 tahun. Pengembangan panas bumi juga punya peranan penting dalam pengembangan infrastruktur dan wilayah perekonomian di wilayah sekitar potensi panas bumi.

Sejak Pemerintah Indonesia terlibat aktif dalam memenuhi Paris Agreement melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Initiatives Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) pelaksanaan berbagai kebijakan seputar Energi Baru Terbarukan (EBT) meningkat. Salah satunya adalah kebijakan pengembangan energi panas bumi. Pemanfaatan panas bumi akan memperkuat perekonomian nasional dengan menekan pengaruh fluktuasi minyak dunia sehingga akan mempengaruhi pemakaian dan sekaligus mengurangi impor BBM.

Saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat juga tengah dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT). Dalam progress yang terus meningkat kemajuannya walau dalam tekanan pandemi Covid-19. RUU EBT terus dikerjakan sebagai langkah nyata untuk segera meninggalkan ketergantungan terhadap energi fosil, dan beralih ke energi baru dan terbarukan, seperti geothermal alias panas bumi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Komisi VII DPR RI yang membidangi energi dan sumber daya alam serta riset dan teknologi, memandang perlu untuk melakukan Kunjungan Kerja ke PLTP yang sudah beroperasi dan sedang dalam persiapan pembangunan unit lainnya yang dikelola oleh PT Geo Dipa Energi (Persero).

PT Geo Dipa Energi (Persero) merupakan salah satu *Special Mission Vehicles* (SMV) di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki misi untuk mendukung program Pemerintah dalam penyediaan tenaga listrik panas bumi. Sehingga secara menyeluruh dapat dipenuhi kebutuhan-kebutuhan antara lain kebutuhan listrik yang terus meningkat, dukungan tercapainya *sustainable development goal* termasuk pengurangan kemiskinan terutama pada masyarakat sekitar sumber potensi panas bumi, mendukung tercapainya komitmen global di dalam mengurangi *climate change* dan memenuhi tercapainya suatu energy mix yaitu komitmen untuk mencapai 23% komposisi bauran energi di Indonesia yang berasal dari EBT.

Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 ini dilakukan dalam rangka mengetahui secara langsung operasi PLTP yang sudah beroperasi dan rencana pembangunan PLTP yang berikutnya serta sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan, dan sebagainya. Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan dapat mengetahui secara langsung kendala, hambatan yang dihadapi. Tujuan lainnya adalah menyerap aspirasi masyarakat sekitar sumber panas bumi dan juga pemerintah daerah setempat dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi.

B. Dasar Hukum Kegiatan Kunjungan Kerja

Dasar Hukum pelaksanaan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

3. Keputusan Rapat Internal Komisi VII DPR RI tentang Agenda Kerja Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021.

C. Tujuan Kunjungan Kerja

Maksud diadakannya Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke PT Geo Dipa Energi (Persero) di Bandung adalah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan serta menyerap aspirasi dan melihat secara langsung perkembangan di daerah, khususnya pengelolaan energi dan sumber daya mineral serta riset dan teknologi. Adapun tujuan kunjungan kerja ini adalah sebagai berikut :

1. Mendapatkan data, informasi dan melihat secara langsung perkembangan sektor energi dan sumber daya mineral serta riset dan teknologi di Provinsi Jawa Barat.
2. Mengetahui tingkat efektivitas peran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai persoalan energi, sumber daya alam, riset dan teknologi yang dihadapi di Provinsi Jawa Barat.
3. Mengetahui berbagai persoalan dan masalah yang dihadapi di PLTP ini terutama mendapatkan masukan untuk RUU EBT yang sedang dikerjakan terutama aspek tekno-ekonomiknya sehingga dapat dikaji lebih jauh opportunity untuk private sectors.
4. Melihat secara langsung kinerja yang dilaksanakan mitra Komisi VII DPR RI dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di PLTP PT Geo Dipa Energi (Persero) Bandung ini.

D. Waktu, Lokasi dan Agenda Kegiatan

Kegiatan Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI dilaksanakan pada tanggal 9 – 13 Oktober 2020 dengan tujuan kunjungan ke PT Geo Dipa Energi (Persero) Bandung. Sedangkan agenda kegiatan kunjungan kerja adalah melakukan pertemuan dengan pihak yang terkait di daerah dan meninjau langsung ke lokasi, dengan agenda sebagai berikut:

1. Pertemuan dengan Direksi PT. Geo Dipa Energi (Persero), Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat dan jajaran terkait.
2. Peninjauan lapangan ke PLTP yang beroperasi maupun proyek ekspansinya.

E. Sasaran dan Hasil Yang Ingin Dicapai

Sasaran dari kegiatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke PT Geo Dipa Energi (Persero) Bandung adalah melihat langsung dan untuk memperoleh informasi terkait dengan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Riset dan Teknologi (Ristek), khususnya ketenagalistrikan yang bersumber pada panas bumi.

Hasil kegiatan Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 diharapkan bisa menjadi rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam rapat-rapat Komisi VII DPR RI dengan mitra terkait dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran.

F. Anggota Tim Kunjungan Kerja

Kunjungan kerja ini diikuti oleh Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI, yang merupakan representasi dari tiap-tiap fraksi sebagaimana disajikan Lampiran 1.

DAFTAR ANGGOTA TIM KUNJUNGAN RESES KOMISI VII DPR RI KE PROVINSI JAWA BARAT MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2019-2020 TANGGAL 9-13 SEPTEMBER 2020			
NAMA	NO. ANGG	FRAKSI	JABATAN
EDDY SOEPARNO	A-496	PAN	KETUA TIM
SUGENG SUPARWOTO	A-373	NASDEM	WK. TIM
DONY MARYADI OEKON	A-176	PDIP	ANGGOTA
ADIAN NAPITUPULU	A-168	PDIP	ANGGOTA
ISMAIL THOMAS	A-250	PDIP	ANGGOTA
WILLY MIDEL YOSEPH	A-244	PDIP	ANGGOTA

HASNURYADI SULAIMAN	A-336	GOLKAR	ANGGOTA
Dra. Hj. HAENY RELAWATI RINI	A-321	GOLKAR	ANGGOTA
DYAH RORO ESTI WIDYA PUTRI	A-311	GOLKAR	ANGGOTA
H. SUBARNA, SE, M.Si	A-95	P. GERINDRA	ANGGOTA
R. WULANSARI	A-96	P. GERINDRA	ANGGOTA
INA ELIZABETH KOBAK	A-407	NASDEM	ANGGOTA
ABDUL WAHID	A-4	PKB	ANGGOTA
SAADIAH ULUPUTY	A-458	PKS	ANGGOTA
Dra. NANI HERRY MURTI	SEKRETARIAT OMISI		
DADAY			
AGUS ARIYANTO			
TAUFAN TAMPUBOLON	TENAGA AHLI		
DIFO RAHMAN	TV PARLEMEN		
RUNI SARI BUDIATI	PEMBERITAAN		
FITROH ABDUL MALIK	DRIVER		

BAGIAN II

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASIL KUNJUNGAN KERJA

A. Pelaksanaan Kegiatan

Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI memulai kunjungan ke Provinsi Jawa Barat dimulai pada tanggal 9 Oktober 2020. Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI langsung menuju ke lokasi PLTP Geo Dipa Energi (Persero) di Gunung Patuha, Ciwidey, Kabupaten Bandung untuk melakukan pertemuan dan peninjauan lapangan ke PLTP 60 MW dan proyek pembangunan PLTP 55 MW tersebut. Pada pertemuan tersebut hadir diantaranya Direktur Utama, Direktur Operasi & Pengembangan Usaha dan Direktur Sumber Daya Manusia & Keuangan PT Geo Dipa Energi (Persero), Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan & Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat. Pada pertemuan tersebut membahas gambaran umum energi baru terbarukan secara nasional, paparan khusus terkait PLTP PT Geo Dipa Energi (Persero) Patuha 1 dan beberapa permasalahan lainnya.

B. Hasil Kunjungan Kerja

Pada pelaksanaan kunjungan kerja ini diskusi yang atas aspirasi yang mengemuka adalah :

1. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi PT Geo Dipa Energi (Persero) Patuha 1 menghasilkan harga listrik murah, pengelolaan teknologi oleh tenaga nasional, Tingkat Kandungan Dalam Negeri 34%
2. Pada pengembangan energi nasional khususnya penyediaan tenaga listrik yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dengan acuan *advantage posisi Ring of Fire* adalah pemanfaatan panas bumi.

Secara rinci, hasil kunjungan kerja ini berupa data dan informasi yang disajikan dalam info grafis berikut ini :

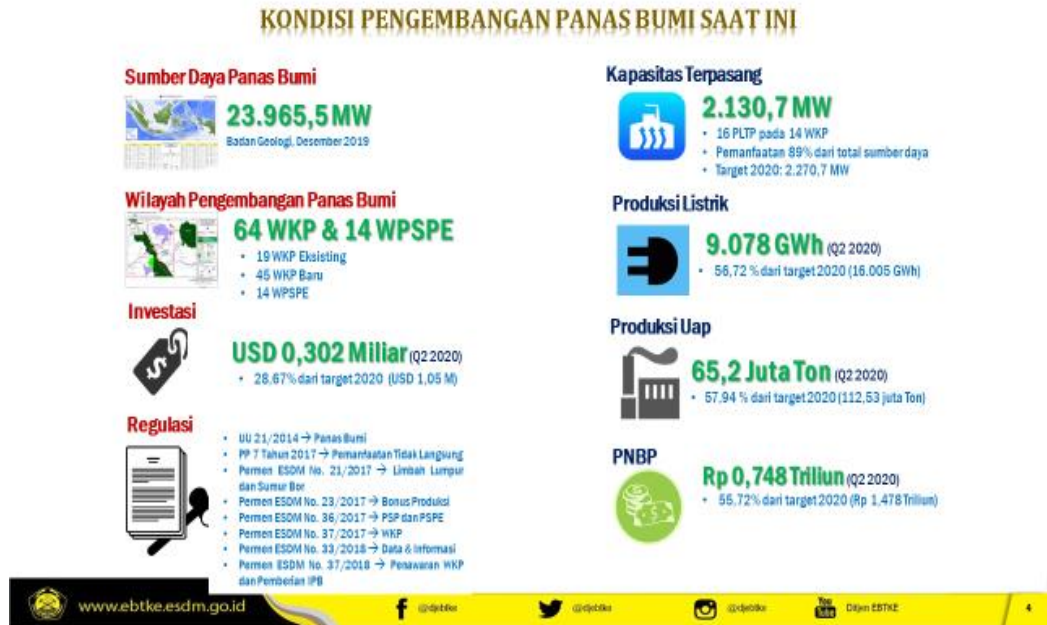
1. Potensi sumber energi baru terbarukan



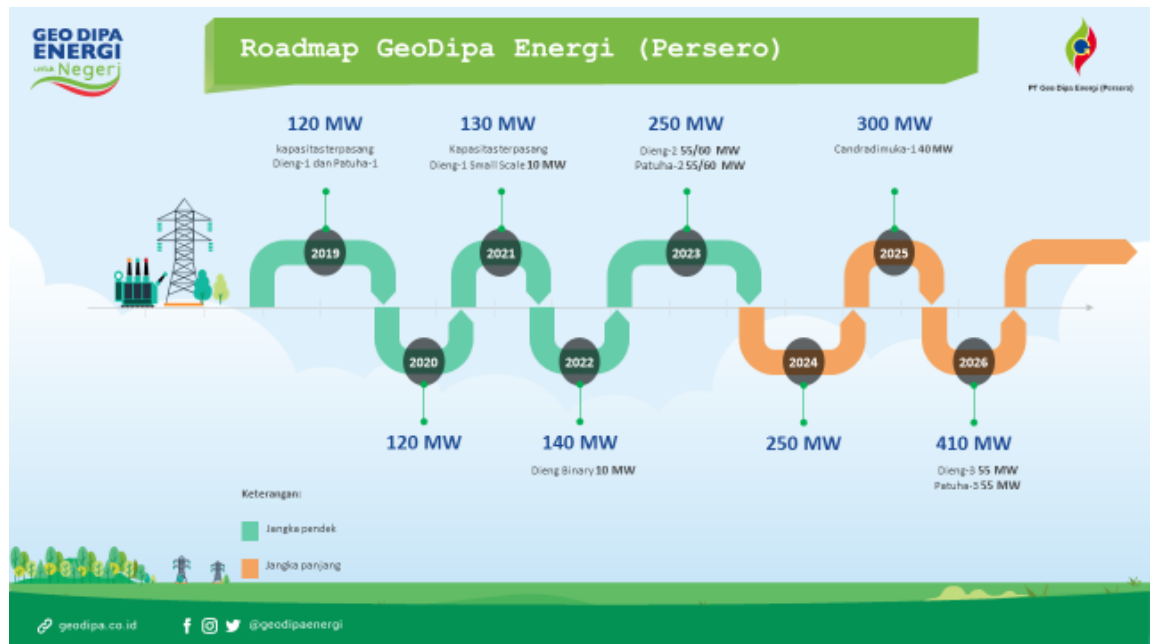
2. Sebaran potensi panas bumi di Jawa Barat



- Kondisi Nasional pengembangan panas bumi
Tantangan Nasional kedepan cukup jelas untuk mengembangkan sumber daya panas bumi bagi kesejahteraan rakyat.



- Roadmap PLTP PT Geo Dipa Energi (Persero)**
Bukti nyata anak bangsa dalam mengelola PLTP yang dilakukan 80an orang dan 78% nya adalah sumber daya manusia usia kurang dari 40 tahun



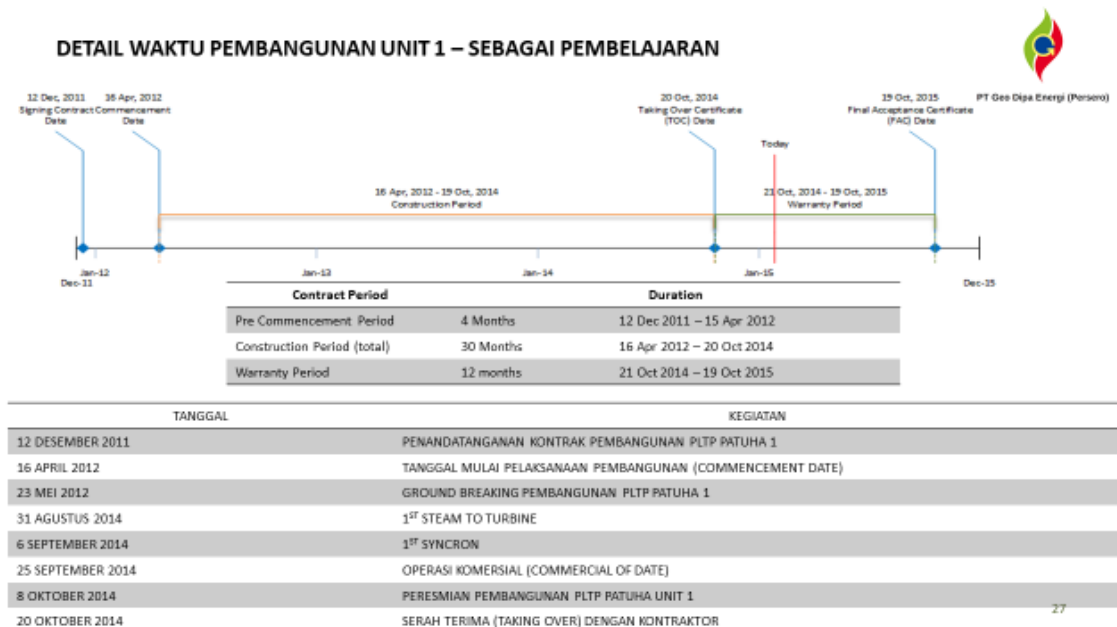
5. *Aerial view* PLTP Patuha

Bukan hoax, teknologi energi beriringan harmonis dengan lingkungan hidup kehutanan



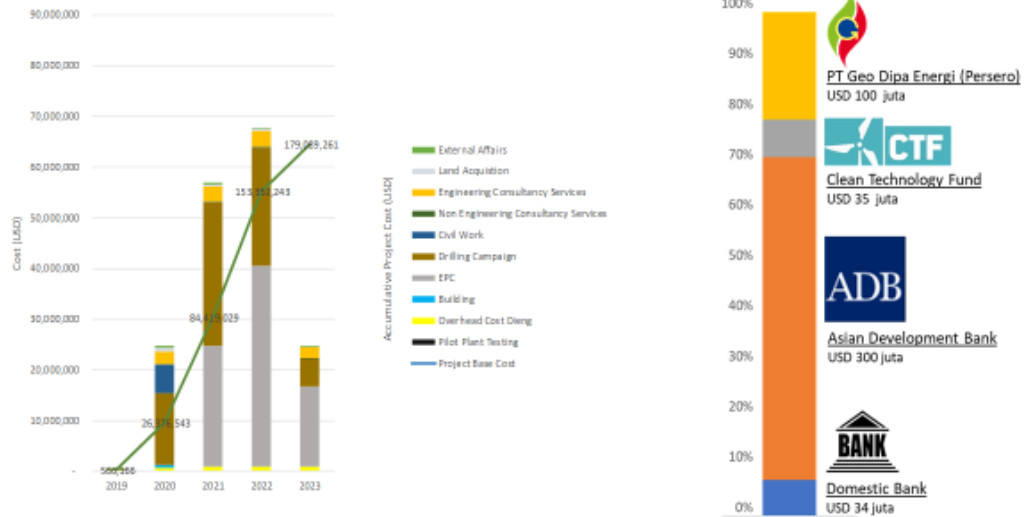
6. *Learning curve* PLTP Patuha 1

Masukan berharga untuk RUU Energi Baru dan Terbarukan.



7. Pembiayaan PLTP PT Geo Dipa Energi (Persero)
Tampak bahwa *opportunity* yang menarik bagi *private sectors* untuk berkontribusi dalam mengembangkan tenaga panas bumi

SUMBER PENDANAAN PLTP PATUHA & PLTP DIENG UNIT 2



8. Kinerja PLTP Patuha pada aspek lingkungan hidup
Bukti nyata komitmen Indonesia pada Kesepakatan Paris Agreement.



9. Tantangan pengembangan PLTP Nasional
Kondisi yang hanya menunggu regulasi yang memadai

SUMBER DAYA PANAS BUMI PER PROVINSI

No.	Provinsi	Jumlah Titik Sumber Daya	Sumber Daya (MW)				Total (MW - %)	Kapasitas Terpasang (MW)	
			Spekulatif	Hipotetik	Mungkin	Cadangan Terdaftar Terbukti			
Sumatera									
1	Aceh	19	324	228	631	25	-	1.208 (5.04%)	-
2	Sumatera Utara	18	250	388	730	54.7	453.3	1.878 (7.33%)	284.3
3	Sumatera Barat	19	471	579	495	50	35	1.680 (7.01%)	85
4	Riau	4	45	-	-	-	-	45 (0.18%)	-
5	Jambi	9	352	87	319	75	0	834 (3.48%)	-
6	Bengkulu	5	134	0	299	389	110	932 (3.88%)	-
7	Bangka Belitung	7	100	5	-	-	-	105 (0.44%)	-
8	Sumatera Selatan	7	225	230	363	221	202	1.241 (5.19%)	55
9	Lampung	13	375	40	899	225	220	1.758 (7.33%)	220
Jawa									
10	Banten	7	125	161	365	-	-	651 (2.72%)	-
11	Jawa Barat	41	1015	469	1555	174	1580	4.793 (19.99%)	1.193.8
12	Jawa Tengah	14	30	270	622	130	240	1.342 (5.50%)	60
13	D.I. Yogyakarta	1	-	-	10	-	-	10 (0.04%)	-
14	Jawa Timur	11	70	290	862	114	0	1.338 (5.57%)	-
Bali - Nusa Tenggara									
15	Bali	6	70	21	104	110	30	335 (1.39%)	-
16	Nusa Tenggara Barat	3	-	6	169	-	-	175 (0.73%)	0
17	Nusa Tenggara Timur	28	190	142	723	121	12.5	1.188.5 (4.96%)	12.5
Kalimantan									
18	Kalimantan Barat	5	65	0	0	0	0	65 (0.27%)	-
19	Kalimantan Timur	2	17	0	0	0	0	17 (0.07%)	-
20	Kalimantan Utara	4	20	17	13	0	0	50 (0.20%)	-
21	Kalimantan Selatan	3	49	1	0	0	0	50 (0.20%)	-
Sulawesi									
22	Sulawesi Utara	9	55	73	410	180	120	628 (3.45%)	120
23	Sorontalo	5	129	11	20	0	0	160 (0.7%)	-
24	Sulawesi Tengah	29	401	61	368	-	-	830 (3.46%)	-
25	Sulawesi Barat	13	321	53	32	-	-	406 (1.69%)	-
26	Sulawesi Selatan	21	259	139	118	0	0	516 (2.15%)	-
27	Sulawesi Tenggara	13	200	25	93	-	-	318 (1.33%)	-
Maluku - Papua									
28	Maluku Utara	15	190	7	373	0	0	575 (2.40%)	-
29	Maluku	18	370	84	118	6	2	580 (2.42%)	-
30	Papua Barat	3	75	0	0	0	0	75 (0.31%)	-
TOTAL		351	9957	3317	9696	1875.7	3054.8	23945.5	2.130.4

BAGIAN III KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI pada Rese Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Jawa Barat pada tanggal 9 – 13 Oktober 2020 menghasilkan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Kenyataan yang sulit terbantahkan adalah pembangunan dan pengembangan PLTP Patuha 1 adalah suatu *best practice* yang patut menjadi acuan dan masukan yang berguna dalam RUU EBT
2. Guna memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara maka dibutuhkan *political will* Komisi VII DPR-RI yang lebih kuat lagi untuk mengacu pemanfaatan EBT pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PLN jangka menengah dan panjang.





BAGIAN IV PENUTUP

Demikian hasil pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Jawa Barat yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 – 13 Oktober 2020. Semoga hasil dari kegiatan kunjungan kerja ini memberi manfaat untuk kita semua.

Terima kasih.

Jakarta, 13 Oktober 2020
Komisi VII DPR RI

